



KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan keseragaman dalam pengelolaan pilar titik referensi, perlu dilakukan penataan pengelolaan titik referensi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengamanatkan untuk membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini yang dimaksud dengan:

1. Titik Referensi yang selanjutnya disingkat TR, adalah titik berkoordinat geografis sebagai referensi posisi dan penentuan titik dasar.
2. Pilar Titik Referensi yang selanjutnya disingkat PTR, adalah bangunan pilar yang berlokasi di darat berkoordinat geografis.
3. Titik Dasar yang selanjutnya disingkat TD, adalah titik koordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air terendah dalam menentukan wilayah laut atau yuridiksi.
4. Pengelolaan adalah proses verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan pilar titik referensi.
5. Verifikasi dan Pemetaan adalah kegiatan pengukuran, perhitungan, pendataan, dan penggambaran permukaan bumi.
6. Pembangunan adalah proses pelaksanaan pembangunan pilar titik referensi yang belum ada atau rusak total/hilang dan/atau pemindahan pilar titik referensi dari titik koordinat awal/semula.
7. Renovasi adalah perbaikan bangunan pilar titik referensi pada titik kordinat awal/semula.
8. Pemeliharaan adalah proses menjaga dan merawat pilar titik referensi dalam keadaan baik.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB II

PTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengelolaan PTR meliputi:

- a. verifikasi dan pemetaan;
- b. pembangunan;
- c. renovasi; dan
- d. pemeliharaan

Bagian Kedua

Posisi PTR

Pasal 3

- (1) PTR berada di sekitar pantai yang berbatasan dengan negara tetangga atau laut bebas.
- (2) PTR sebagaimana dimaksud ayat (1) berbatasan antara:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Singapura.
 - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Malaysia.
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Filipina.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste.
 - e. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini.
 - f. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan India.
 - g. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Thailand.
 - h. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Vietnam.
 - i. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Palau.
 - j. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Australia.
 - k. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan laut bebas.

Pasal 4

- (1) Posisi PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Posisi dan jumlah PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

Bagian Ketiga Bentuk dan Desain PTR

Pasal 5

- (1) PTR berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 80 centimeter, lebar 80 centimeter, dan tinggi 150 centimeter.
- (2) PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keramik berwarna putih ukuran panjang 40 centimeter dan lebar 40 centimeter.

Pasal 6

Desain dan detail PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat Informasi dalam PTR

Pasal 7

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada bagian atas tengah terdapat tembaga berbentuk lingkaran dengan diameter 40 centimeter.
- (2) Tembaga berbentuk lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut TR;
 - b. gambar Titik Pusat Koordinat;
 - c. tulisan MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGGANGGU PTR INI; dan
 - d. tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
- (3) Tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jenis huruf *Franklin Gothic Medium* warna hitam.

- (4) Ukuran tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 70 point.
- (5) Ukuran tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 40 point.

Pasal 8

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada bagian sisi muka terdapat keramik hitam berukuran 60 centimeter kali 60 centimeter.
- (2) Keramik hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. TD;
 - b. TR;
 - c. Titik Koordinat TR;
 - d. keberadaan Lokasi PTR (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi);
 - e. tanggal, bulan, tahun pembuatan; dan
 - f. tulisan MERUSAK PTR INI DIKENAKAN SANKSI PIDANA.
- (3) Tulisan pada keramik hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jenis huruf *Franklin Gothic Medium*, warna putih dan ukuran 90 point.

BAB III

VERIFIKASI DAN PEMETAAN PTR

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan Pemetaan PTR dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Informasi Geospasial, Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan.
- (2) Verifikasi dan Pemetaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal verifikasi dan pemetaan dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 10

Pelaksana verifikasi dan pemetaan PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat melibatkan pemerintah daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN PTR

Pasal 11

- (1) Pembangunan PTR dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Informasi Geospasial, Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan.
- (2) Pembangunan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal pembangunan PTR dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melibatkan pemerintah daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) PTR yang rusak total atau hilang dapat dilakukan pemindahan posisi PTR.
- (2) Pemindahan posisi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke lokasi terdekat dari posisi awal dan aman.

BAB V

RENOVASI PTR

Pasal 14

- (1) Renovasi PTR dilaksanakan oleh BNPP.
- (2) BNPP dalam melakukan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Informasi Geospasial, Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah.

- (3) BNPP dalam melakukan renovasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB VI

PEMELIHARAAN PTR

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan PTR dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan BNPP.
- (3) Pemerintah daerah melaporkan pemeliharaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNPP dengan tembusan Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan

BAB VII

PENGAMANAN PTR

Pasal 16

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan pengamanan dengan pagar berpintu.
- (2) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari besi atau tembok dengan tinggi 75 centimeter.
- (3) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk melengkung dengan tinggi paling rendah 75 centimeter.

Pasal 17

Bentuk dan desain pagar PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VIII PENGEMBANGAN AREA SEKITAR PTR

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan area sekitar PTR.
- (2) Pengembangan area sekitar PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat rekreasi atau pariwisata.
 - b. aktivitas perekonomian.
 - c. tempat olah raga.
- (3) Pemerintah daerah dalam mengembangkan area sekitar PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB IX PENYEBARLUASAN INFORMASI PTR

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan informasi PTR secara nasional dilakukan oleh BNPP, Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Badan Informasi dan Geospasial, dan Kementerian Pertahanan.
- (2) Penyebarluasan informasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal penyebarluasan informasi PTR dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan informasi PTR di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan penyebarluasan informasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan BNPP.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PTR melalui:

- a. memberikan informasi kondisi PTR.
- b. membantu pengamanan PTR.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemeliharaan PTR dan pengembangan area sekitar PTR yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18.

Pasal 23

- (1) Pembinaan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk mewujudkan kondisi PTR dalam kondisi baik.
- (2) Pembinaan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk menjamin pemeliharaan PTR oleh pemerintah daerah efisien dan efektif.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi PTR, penyebaran informasi secara nasional, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemeliharaan, penyebaran informasi PTR di daerah dan pengembangan area sekitar PTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

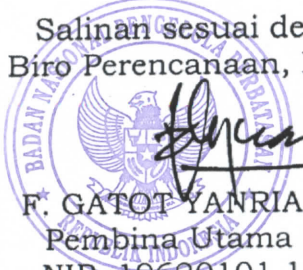
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1163

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum



F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620101.198903.1.001

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

POSISI PILAR TITIK REFERENSI

NO	DASAR HUKUM		TR	TD	LOKASI
	PP 37/2002	PP 38/2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1	1	TR 001	TD 001	Tg. Berakit
2.	2	2	TR 001A	TD 001A	P. Semut
3.	3	3	TR 022	TD 022	P. Tokong Malang Biru
4.	4	4	TR 023	TD 023	P. Damar
5.	5	5	TR 024	TD 024	P. Mangkai
6.	6	6	TR 025	TD 025	P. Tokong Nanas
7.	7	7	TR 026	TD 026	P.Tokong Belayar
8.	8	8	TR 028	TD 028	P. Tokong Boro
9.	9	9	TR 029	TD 029	P. Semiun
10.	10	10	TR 030A	TD 030A	P. Sebetul
11.	11	11	TR 030A	TD 030B	P. Sekatung
12.	12	12	TR 030	TD 030	P. Sekatung
13.	13	13	TR 031	TD 031	P. Senua
14.	14	14	TR 032	TD 032	P. Subi Kecil
15.	15	15	TR 033	TD 033	P. Kepala
16.	16	16	TR 035	TD 035	Tg. Datu
17.	17	17	TR 036	TD 036	P. Sebatik
18.	18	18	TR 036	TD 036A	P. Sebatik
19.	19	19	TR 036	TD 036B	P. Sebatik
20.	20	20	TR 036	TD 037	Karang Unarang
21.	21	21	TR 039	TD 039	P. Maratua
22.	22	22	TR 040	TD 040	P. Sambit
23.	23	23	TR 043	TD 043	P. Lingian
24.	24	24	TR 044	TD 044	P. Salando
25.	25	25	TR 044A	TD 044A	P.Dolangan
26.	26	26	TR 044A	TD 044B	P.Dolangan
27.	27	27	TR 045	TD 045	Tg. Kramat
28.	28	28	TR 046A	TD 046A	Kr. Boliogut
29.	29	29	TR 047	TD 047	P. Bangkit
30.	30	30	TR 048	TD 048	Laimpangi
31.	31	31	TR 049A	TD 049A	Manterawu
32.	32	32	TR 051	TD 051A	Makalehi
33.	33	33	TR 053	TD 053A	Kawalusu
34.	34	34	TR 054	TD 054	P. Kawio
35.	35	35	TR 055	TD 055	P. Marore
36.	36	36	TR 055	TD 055A	P. Marore
37.	37	37	TR 055	TD 055B	P. Batubawaikang

NO	DASAR HUKUM		TR	TD	LOKASI
	PP 37/2002	PP 38/2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	38	38	TR 056	TD 056	P. Miangas
39.	39	39	TR 056	TD 056A	P. Miangas
40.	40	40	TR 057	TD 057A	P. Marampit
41.	41	41	TR 057	TD 057	P. Marampit
42.	42	42	TR 058A	TD 058A	P. Intata
43.	43	43	TR 058	TD 058	P. Kakarutan
44.	44	44	TR 059	TD 059	Tg. Tampida
45.	45	45	TR 060	TD 060	Tg. Sopi
46.	46	46	TR 061	TD 061A	Tg. Gorua
47.	47	47	TR 062	TD 062	Tg. Lelai
48.	48	48	TR 063	TD 063	P. Jiew
49.	49	49	TR 065	TD 065	P. Budd
50.	50	50	TR 066	TD 066	P. Fani
51.	51	51	TR 066	TD 066A	P. Fani
52.	52	52	TR 070	TD 070	P. Miossu
53.	53	53	TR 070A	TD 070A	Tg. Yamursba
54.	54	54	TR 071	TD 071	Tg. Wasio
55.	55	55	TR 072	TD 072	Tg. Fanildo
56.	56	56	TR 072	TD 072A	P. Bras
57.	57	57	TR 074	TD 074	P. Bepondi
58.	58	58	TR 077	TD 076B	Tg. Wasanbari
59.	59	59	TR 077	TD 077	Tg. Basari
60.	60	60	TR 078	TD 078	Tg. Narwaku
61.	61	61	TR 079	TD 079	P. Liki
62.	62	62	TR 080	TD 080	Tg. Kamandra
63.	63	63	TR 080A	TD 080A	Tg. Kelapa
64.	64	64	TR 081	TD 081	Tg. Oinake
65.	65	65	TR 082	TD 082	S. Torasi
66.	66	66	TR 082	TD 082A	S. Torasi
67.	67	67	TR 082	TD 082B	S. Torasi
68.	68	68	TR 082	TD 082C	S. Torasi
69.	69	69	TR 083	TD 083	S. Blatar
70.	70	70	TR 085	TD 085	Kr. Sametinke
71.	71	71	TR 086	TD 086	Ug. Komoran
72.	72	72	TR 088	TD 088A	Ug. Salah
73.	73	73	TR 088	TD 088E	P. Kolepon
74.	74	74	TR 088	TD 088F	S. Korima
75.	75	75	TR 090	TD 090	S. Cook
76.	76	76	TR 091	TD 091	Gosong Triton
77.	77	77	TR 092	TD 092	P. Laag
78.	78	78	TR 093	TD 093	Tg. Pohonbatu
79.	79	79	TR 094	TD 094	Amarapya
80.	80	80	TR 097	TD 097A	P. Ararkula

NO	DASAR HUKUM		TR	TD	LOKASI
	PP 37/2002	PP 38/2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81.	81	81	TR 098	TD 098	P. Karaweira Br
82.	82	82	TR 099	TD 099	P. Panambulai
83.	83	83	TR 099	TR 099A	P. Kultubai Utara
84.	84	84	TR 100	TD 100	P. Kultubai Selatan
85.	85	85	TR 100A	TD 100A	P. Karang
86.	86	86	TR 100B	TD 100B	P. Karang
87.	87	87	TR 100B	TD 101	P. Enu
88.	88	88	TR 100B	TD 101A	P. Enu
89.	89	89	TR 102	TD 102	P. Batugoyang
90.	90	90	TR 103	TD 103	Tg. Weduar
91.	91	91	TR 104	TD 104	P. Larat
92.	92	92	TR 104	TD 105B	Karang Sarikilmasa
93.	93	93	TR 105	TD 105	P. Asutubun
94.	94	94	TR 105	TD 105C	P. Asutubun
95.	95	95	TR 106	TD 106	P. Selaru Timur
96.	96	96	TR 106	TD 106A	P. Selaru Barat
97.	97	97	TR 107	TD 107	P. Batarkusu
98.	98	98	TR 107	TD 107A	Fursey
99.	99	99	TR 107	TD 107C	Tg. Arousu
100.	100	100	TR 108	TD 108	P. Masela
101.	101	101	TR 109	TD 109	P. Meatimearang
102.	101A	102	TR 196	TD 110	Tg. Karang, P. Leti
103.	101B	103	TR 196	TD 110A	Tg. Kesioh, P. Leti
104.	101C	104	TR 198	TD 111	Tutun Yen, P. Kaisar
105.	101D	105	TR 112	TD 112	Tutun Eden, P. Wetar
106.	101E	106	TR 112A	TD 112A	P. Lirang
107.	101F	107	TR 113	TD 113	Tg. Lisomu, P. Alor
108.	101G	108	TR 113A	TD 113A	Tg. Seromu, P. Alor
109.	101H	109	TR 205	TD 113B	Tg. Sibera, P. Alor
110.	101I	110	TR 205	TD 114	Mota Biku, P. Timor
111.	101J	111	TR 205	TD 114A	Mota Talas, P. Timor
112.	102	112	TR 115	TD 115	Tg. Wetoh
113.	103	113	TR 116	TD 116	Tg. Batu Merah
114.	104	114	TR 117	TD 117	Tg. Haekmeo
115.	105	115	TR 118	TD 118	Tg. Tunfano
116.	106	116	TR 120	TD 120	Tg. Puleh
117.	107	117	TR 121	TD 121	P. Dana
118.	108	118	TR 122	TD 122	Tg. Merebu
119.	109	119	TR 123	TD 123	P. Dana
120.	110	120	TR 123	TD 123A	P. Dana
121.	111	121	TR 124	TD 124	Tg. Ngunju
122.	112	122	TR 125	TD 125	P. Mangudu
123.	113	123	TR 125	TD 125A	P. Mangudu

NO	DASAR HUKUM		TR	TD	LOKASI
	PP 37/2002	PP 38/2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124.	114	124	TR 128B	TD 128B	Tg. Merapu
125.	115	125	TR 128	TD 128	Tg. Karoso
126.	116	126	TR 129	TD 129	Toro Doro
127.	117	127	TR 130	TD 130A	Tg. Talonan
128.	118	128	TR 130	TD 130	Tg. Talonan
129.	119	129	TR 131	TD 131	P. Sophialouisa
130.	120	130	TR 133	TD 133	Tg. SediHING
131.	121	131	TR 134A	TD 134A	Tg. Ungasan
132.	122	132	TR 134	TD 134	Tg. Mebulu
133.	123	133	TR 135	TD 135	Tg. Bantenan
134.	124	134	TR 138	TD 138	P. Barung
135.	125	135	TR 139	TD 139	P. Sekel
136.	126	136	TR 139	TD 139A	P. Panehan
137.	127	137	TR 140	TD 140	Tg. Batur
138.	127A	138	TR 141	TD 141	Tg. Ngeres Langu
139.	127B	139	TR 142	TD 142	Batu Tugur
140.	128	140	TR 143	TD 143	Nusakambangan
141.	129	141	TR 144A	TD 144A	Tg. Legokjawa
142.	130	142	TR 144	TD 144C	P. Manuk
143.	131	143	TR 144	TD 144	Tg. Tawulan
144.	132	144	TR 145	TD 145	Tg. Gedeh
145.	133	145	TR 146	TD 146	Ug. Genteng
146.	134	146	TR 147	TD 147	P. Deli
147.	135	147	TR 148	TD 148A	Karang Pabayang
148.	136	148	TR 148	TD 148	Tg. Guhakolak
149.	137	149	TR 151	TD 151	P. Batukecil
150.	138	150	TR 152	TD 152	Ug. Walor
151.	139	151	TR 154A	TD 154A	Tg. Kahoabi
152.	140	152	TR 154	TD 154	Tg. Labuho
153.	141	153	TR 154	TD 154B	Tg. Labuho
154.	142	154	TR 155	TD 155	Tg. Kooma
155.	143	155	TR 156	TD 156	P. Mega
156.	144	156	TR 158	TD 158	P. Sibarubaru
157.	145	157	TR 159	TD 159	Tg. Betumonga
158.	146	158	TR 161	TD 161	P. Sinyaunyaw
159.	147	159	TR 161	TD 161B	Tg. Simansih
160.	148	160	TR 162	TD 162	Tg. Sakaladat
161.	149	161	TR 164	TD 164B	P. Simuk
162.	150	162	TR 164	TD 164	P. Simuk
163.	151	163	TR 167	TD 167	P. Wungga
164.	152	164	TR 168	TD 168	Tg. Toyolawa
165.	153	165	TR 170	TD 170	P. Simeulucut
166.	154	166	TR 171	TD 171	P. Salaut Besar

NO	DASAR HUKUM		TR	TD	LOKASI
	PP 37/2002	PP 38/2008			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
167.	155	167	TR 171A	TD 171C	P. Salaut Besar
168.	156	168	TR 174	TD 174	P. Raya
169.	157	169	TR 175	TD 175	P Rusa
170.	158	170	TR 176A	TD 176A	P. Bengkulu
171.	159	171	TR 177	TD 177	P. Rondo
172.	160	172	TR 177	TD 177A	P. Rondo
173.	161	173	TR 178	TD 178	Ug. Le Meule
174.	162	174	TR 179	TD 179	Ug. Pidie
175.	163	175	TR 180	TD 180	Ug. Peusangan
176.	164	176	TR 181	TD 181	Tg. Jamboaye
177.	165	177	TR 181	TD 181A	P. Paru Buso
178.	166	178	TR 182	TD 182	Ug. Peureula
179.	167	179	TR 183	TD 183	Ug. Tamilang
180.	168	180	TR 184	TD 184	P. Berhala
181.	169	181	TR 185	TD 185	P. Batu Mandi
182.	170	182	TR 186	TD 186	Tg. Punah
183.	171	183	TR 186A	TD 186A	Tg. Parit
184.	172	184	TR 187	TD 187	Tg. Kedabu
185.	173	185	TR 188	TD 188	P. Iyu Kecil
186.	174	186	TR 189	TD 189	P. Karimun Kecil
187.	175	187	TR 190	TD 190	P. Nipah
188.	176	188	TR 190	TD 190A	P. Nipah
189.	177	189	TR 191	TD 191	P. Pelampong
190.	178	190	TR 191A	TD 191A	Kr. Helen Mars
191.	179	191	TR 191B	TD 191B	Kr. Benteng
192.	180	192	TR 192	TD 192	Batu Berhanti
193.	181	193	TR 193	TD 193	P. Nongsa
194.	182	194	TR 194	TD 194	Tg. Sanding
195.	183	195	TR 001	TD 195	Tg. Berakit

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

Ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum

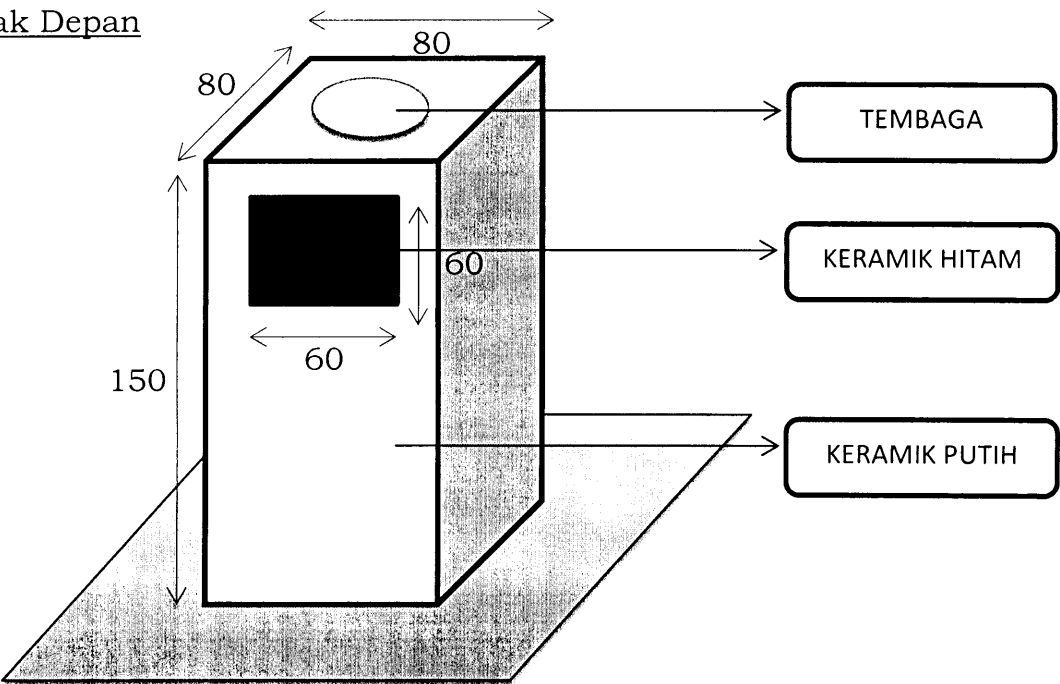


F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620101.198903.1.001

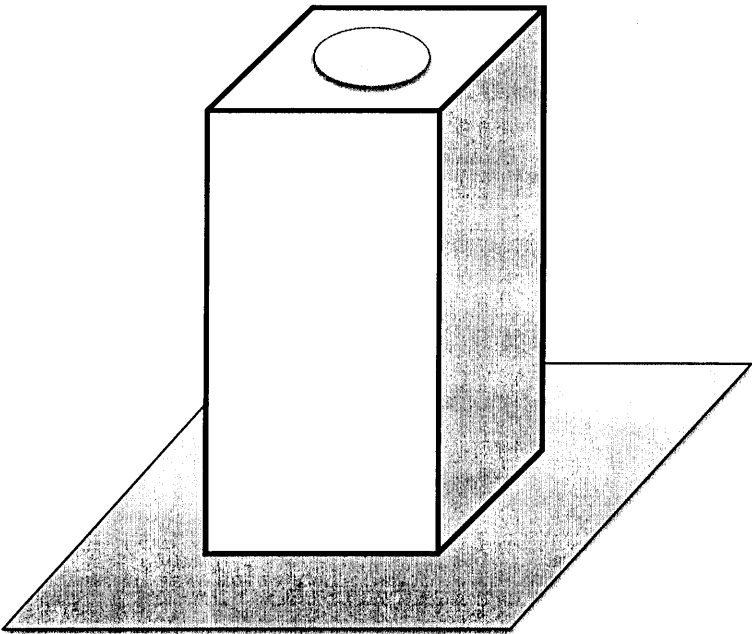
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

BENTUK DAN DESAIN PTR

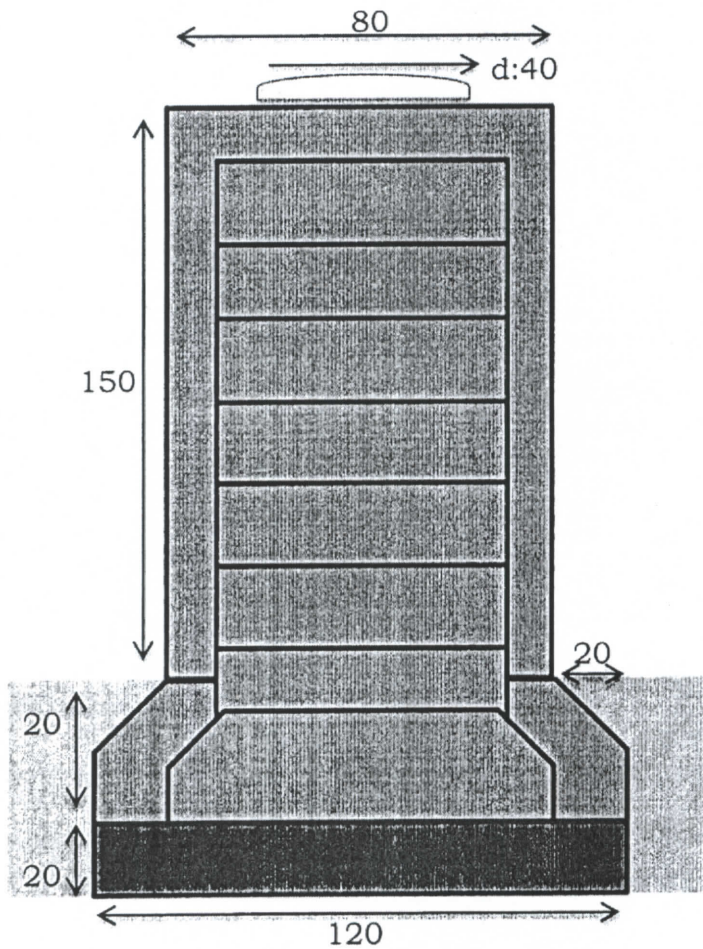
A. Tampak Depan



B. Tampak Belakang



C. Pondasi PTR

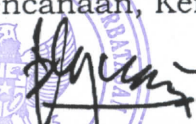


MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

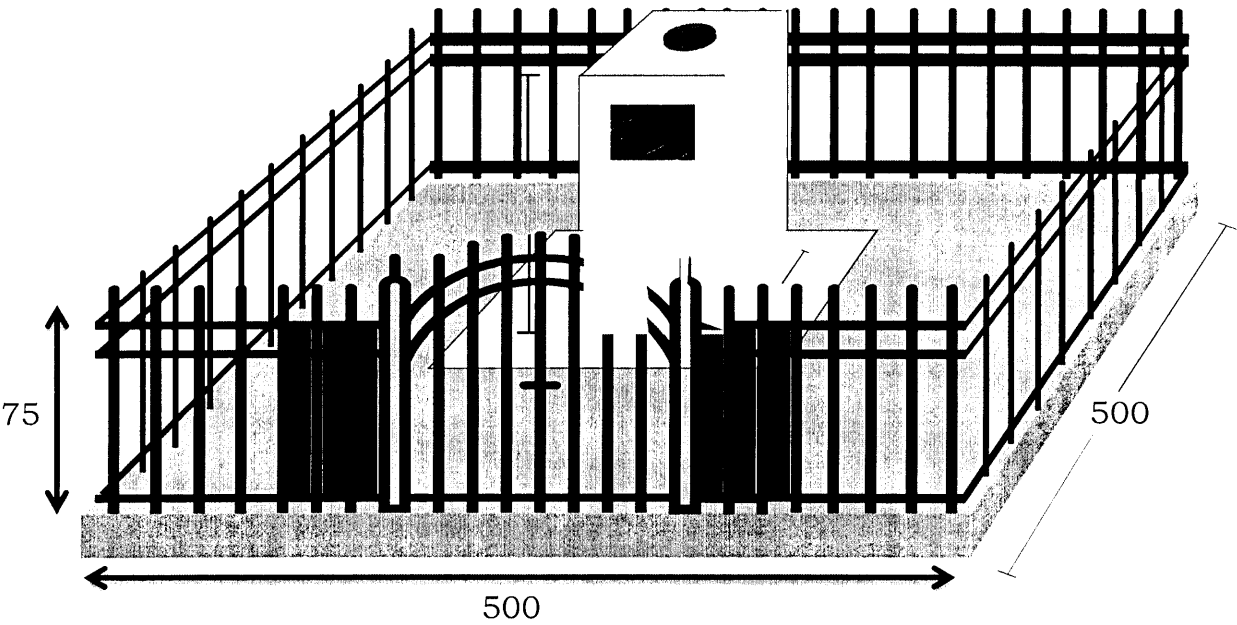
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum


F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620101.198903.1.001

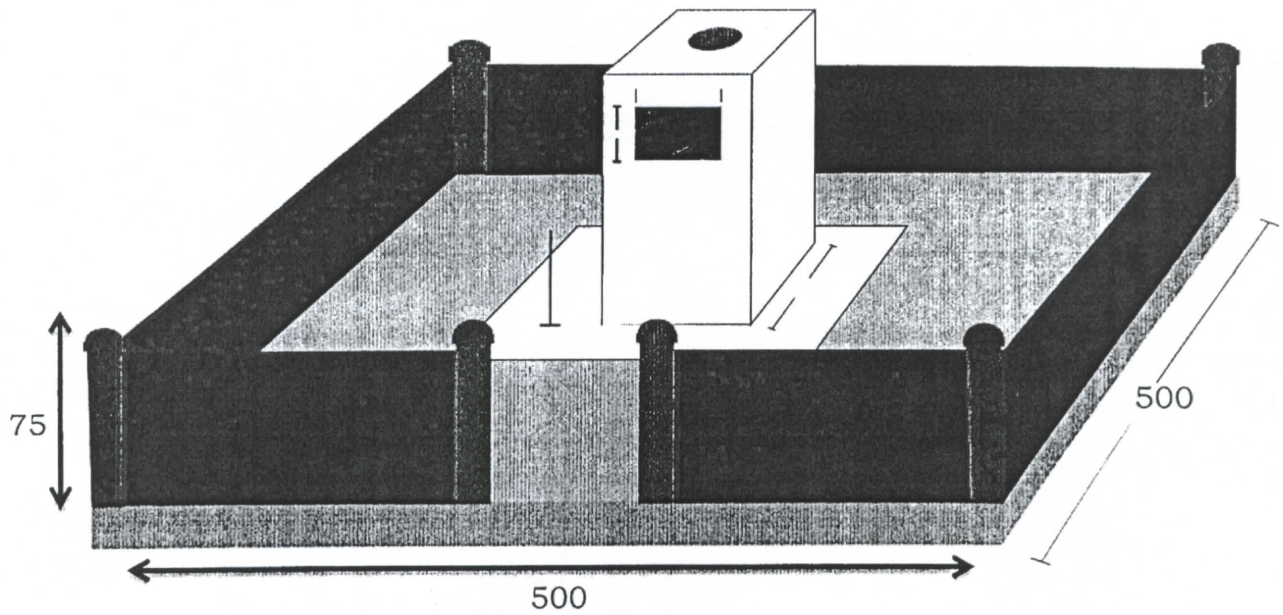
LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

PAGAR PTR

A. Pagar Besi



B. Pagar Tembok

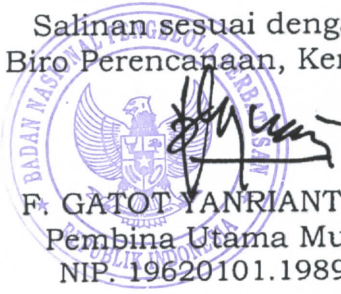


MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum


F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620101.198903.1.001